

REKOMENDASI PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI DESA PANJARATAN

by Kehutanan turnitin

Submission date: 29-Jun-2024 08:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2410226671

File name: ETAPAN_KAWASAN_EKOSISTEM_ESENSIAL_Siti_Qomariah_Abdi_F_Hatta.pdf (546.14K)

Word count: 4016

Character count: 26722

REKOMENDASI PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI DESA PANJARATAN

Recommendations for Establishing Essential Ecosystem Areas in Panjaratan Village

Siti Qomariah, Gusti Muhammad Hatta, dan Abdi Fithria

Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *Essential Ecosystem Areas in general can be interpreted as protected areas outside conservation areas. In Panjaratan Village, it is found an area that is a habitat for proboscis monkeys and other animals according to the results of the inventory but is outside the conservation forest area. The existence of proboscis monkey (*Nasalis larvatus*) habitat in Panjaratan Village needs to be supported in conservation so that it does not experience extinction due to interference for human activities. This study aims to provide recommendations in planning the determination of essential ecosystem areas for the *Nasalis larvatus* habitat in Panjaratan Village. This research was qualitative by using an emic approach that focuses on data and analysis based on answers from key informant. The results showed that the presence of *Nasalis larvatus* habitat in Panjaratan Village received support from the community, government and the private sector in its empowerment activities. This is supported by the existence of an inventory and verification of the presence of *Nasalis larvatus* habitat in Panjaratan Village conducted by the South Kalimantan Natural Resource Conservation team and through identification activities to then propose the *Nasalis larvatus* habitat area in the village to become an area of essential ecosystem areas.*

Keywords: *Nasalis larvatus, essential ecosystem areas, Panjaratan Village*

ABSTRAK. Kawasan Ekosistem Esensial secara umum dapat diartikan sebagai kawasan perlindungan di luar kawasan konservasi. Di Desa Panjaratan ditemukan kawasan yang menjadi habitat bekantan dan satwa lain sesuai hasil inventarisasi namun tidak berada kawasan hutan konservasi. Keberadaan populasi bekantan di Desa Panjaratan perlu mendapat dukungan dalam pelestarian agar tidak mengalami kepunahan akibat adanya gangguan dari kegiatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam perencanaan penetapan kawasan ekosistem esensial terhadap habitat bekantan di Desa Panjaratan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan emik yang terfokus kepada data dan analisa berdasarkan jawaban dari informan kunci. Hasil wawancara dan observasi akan menjadi data primer dalam penelitian ini. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari data keberadaan satwa di Desa Panjaratan serta literatur mengenai kawasan ekosistem esensial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan habitat bekantan di Desa Panjaratan mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah serta swasta dalam kegiatan pemberdayaannya. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan inventarisasi dan verifikasi terhadap keberadaan habitat bekantan di Desa Panjaratan oleh tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan melalui kegiatan identifikasi yang kemudian mengusulkan areal habitat bekantan di desa tersebut menjadi areal kawasan ekosistem esensial.

Kata kunci: *bekantan; kawasan ekosistem esensial; Desa Panjaratan*

Penulis untuk korespondensi, surel: gomariah.siti1410@gmail.com

PENDAHULUAN

Nasalis larvatus atau Bekantan masuk dalam bagian Famili Cercopithecidae yang merupakan satu diantara jenis satwa primata khas Kalimantan baik yang berada di kawasan konservasi maupun tidak berada di

kawasan konservasi. Satwa langka yang sering disebut dengan sebutan monyet belanda ini sering hidup di sekitar hutan bakau (mangrove). Kerusakan habitat bekantan dan adanya aktivitas manusia pada habitat bekantan menyebabkan penurunan secara terus menerus yang terjadi terhadap populasi bekantan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan terhadap habitat

bekantan antara lain alih fungsi lahan untuk perkebunan dan permukiman, pembuatan jalan dan penebangan ilegal yang menjadi populasi bekantan merasa terancam keberadaannya. Menurut Bismark (2009) menyatakan bahwa struktur umur pada populasi bekantan masih lengkap yang ditunjukkan adanya kelahiran oleh indukkan bekantan. Keadaan yang berubah dan berbeda terjadi pada saat ini. Beberapa data penting yang mempengaruhi keberadaan bekantan seperti faktor-faktor penyebab dan bagaimana variabel habitat bekantan, tidak hanya sekedar pendataan populasinya saja namun perlu digali lebih dalam dan informatif. Bentuk sebaran bekantan secara spasial dalam pemanfaatan ruang gerak serta cara bertahan hidup bekantan pada kondisi tertekan dan semakin terisolasi hingga saat ini belum diinformasikan secara pasti.

Penurunan populasi bekantan saat ini berbanding lurus dengan penurunan kualitas dan penyempitan habitat bekantan. Sekitar 25.625 ekor bekantan ditemukan berada di kawasan konservasi pada tahun 1987 menurut MacKinnon (1987) dengan jumlah keseluruhan diperkirakan 260.950 ekor bekantan pada tahun tersebut. Agar dapat mengetahui tingkat pengelompokan bekantan yang mampu berdampak terhadap populasi pada habitatnya maka perlu adanya penelitian mengenai pentingnya penyebaran populasi bekantan serta bagaimana faktor-faktor yang berperan terhadap ekologi dan status hukum keberadaan bekantan saat ini (Soegianto, 1994). Menurut Krebs (1989) memaparkan bahwa ada alasan lainnya yaitu melalui pola-pola yang mana hasilnya akan membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk mendelineasi kepadatan maupun kelimpahan populasi juga dapat menggunakan metode tersebut. Collinge (2001) juga menekankan bahwa sebuah penelitian dapat ditunjang dengan studi yang empiris dengan sebaran spasialnya dalam kepentingan konservasi sebagai mekanisme praktis dalam mendesain rencana pengelolaan serta penunjang konservasi terhadap kehidupan liar.

Habitat bekantan yang berada di dalam kawasan konservasi hanya sekitar 4%, sedangkan habitat yang telah beralih fungsi mencapai 40%. Menurut Atmoko *et al* (2014) menyatakan bahwa habitat bekantan yang mengalami kerusakan tercepat yaitu pada tepi sungai yang dengan mudah dapat dijangkau oleh masyarakat serta diubah fungsikan menjadi areal seperti untuk

kawasan perkebunan, tambak, permukiman dan lahan pertanian sekalipun. Dan habitat bekantan yang berada di luar kawasan konservasi sekitar 95% tidak menguntungkan bagi populasi bekantan. Haris (2014) menyatakan bahwa pada skala lanskap, bekantan menyukai tamping kawasan vegetasi mangrove yang luas dengan tepi yang kecil.

Berdasarkan pembahasan tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, dimana pembahasan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan terhadap kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam ditujukan agar menjaga keanekaragaman flora dan fauna guna menghindari kepunahan spesies, mengawasi segala jenis pemanfaatan tumbuhan dan satwa secara lestari serta menjaga sistem penyangga kehidupan di muka bumi. Hal ini seiring dengan usaha pemerintah dalam pengelolaan terhadap perlindungan satwa langka seperti bekantan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan pulau Bakut. Kegiatan seperti itu pula yang akan diterapkan pada kawasan-kawasan ditemukannya habitat bekantan di kabupaten Tanah Laut khususnya Desa Panjaratan.

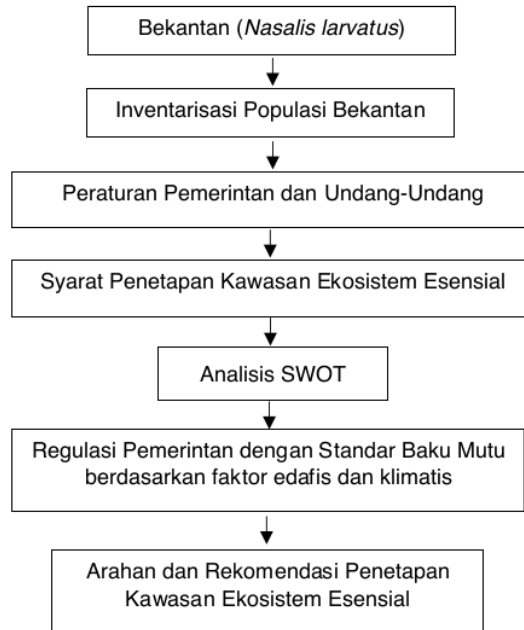
Kawasan ekosistem esensial merupakan kawasan yang memiliki nilai secara ekosistem penting yang bukan berada di dalam kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam hingga taman buru sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup secara ekologi melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati. Penerapan sebagai kawasan yang dilindungi juga berguna untuk mutu kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan dari program tersebut yaitu mengelola secara khusus ekosistem yang tidak berada dalam kawasan konservasi yang memiliki atau teridentifikasi secara ekologis yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rencana penetapan kawasan ekosistem esensial terhadap habitat bekantan di Desa Panjaratan. Sedangkan dari penelitian ini diharapkan manfaat berupa rekomendasi rencana penetapan kawasan ekosistem esensial pada habitat bekantan di Desa Panjaratan yang mampu dilegalkan baik dalam bentuk Surat Keputusan maupun

Peraturan Daerah berdasarkan kesepakatan dari masyarakat, aparat desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga kementerian.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut dalam upaya mendukung rencana penetapan kawasan ekosistem esensial terhadap habitat bekantan di Desa Panjaratan. Tindakan yang

dapat dilakukan yaitu merancang suatu strategi yang terpadu dan terencana melalui rencana penetapan kawasan ekosistem esensial terhadap habitat bekantan yang ditentukan dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang dan ancaman). Secara skematik, penelitian ini menyajikan kerangka pemikiran seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Rekomendasi Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial di Desa Panjaratan

METODE PENELITIAN

Peralatan yang digunakan selama penelitian termasuk kuesioner, kamera untuk dokumentasi, alat tulis serta peta lokasi penelitian. Sebagai objek penelitian yaitu rencana penetapan kawasan ekosistem esensial yang berada di habitat bekantan Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Tempat penelitian "Rekomendasi Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial" secara administratif berada di Desa

Panjaratan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk memperoleh hasil sesuai tujuan penelitian, maka metode yang digunakan yaitu identifikasi, inventarisasi dan verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Februari hingga akhir Maret tahun 2020.

Pelaksanaan penelitian bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan emik yang terfokus kepada data dan analisa berdasarkan jawaban dari orang kunci (*key-informant*). Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pendekatan emik, artinya berdasar dari titik pandang dari dalam

(*internal point*) oleh responden ataupun orang kunci (Moleong, 2005).

Penelitian kualitatif menekankan kepada ketepatan dalam memilih subjek, orang kunci dan ketekunan peneliti sendiri. Subjek dan orang kunci yang dipilih mengacu pada persyaratan bahwa orang tersebut terlibat serta memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kawasan ekosistem esensial. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan kepada instansi atau perorangan yang memiliki informasi terkait dengan penelitian seperti Kepala Desa Panjaratan, Kepala/Staf KPH Tanah Laut, Kepala/Staf Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Selatan dan Kepala/Staf Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi maka dapat dilakukan analisis secara deskriptif serta analisis SWOT. Hasil analisis deskriptif menyajikan data-data dalam bentuk tabulasi, grafik dan diagram. Hal ini bertujuan agar penyajian data-data yang diperoleh dapat dengan mudah untuk dipahami. Menurut ilmu perencanaan, guna memudahkan dalam penyampaian informasi yang harus diterima dan dipahami maka dapat dilakukan dengan penggunaan analisis deskriptif. Sedangkan yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kawasan ekosistem esensial menggunakan pendekatan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities and threats*). Langkah analisis menggunakan pendekatan SWOT menurut Sianipar dan Entong (2003), yaitu: 1) menggunakan faktor-faktor keberhasilan penetapan kawasan ekosistem esensial (*internal dan eksternal*), 2) mengkuantifikasikan faktor-faktor strategis (*internal dan eksternal*), serta 3) merumuskan dan menentukan strategi pengembangan dalam kawasan ekosistem esensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masyarakat yang dipilih sebagai orang kunci yakni orang tersebut memiliki pengetahuan

dan pengalaman dalam persebaran habitat bekantan di Desa Panjaratan serta mengetahui batasan-batasan kegiatan masyarakat dengan aktivitas bekantan di habitatnya. Selain informan dari masyarakat, informan lain yang menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu dari pemerintah yang mana dalam ini berhubungan langsung dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang diwakili oleh staf KPH Tanah Laut, staf Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, staf Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan serta staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebelum melakukan rekomendasi rencana penetapan Kawasan Ekosistem Esensial terhadap hutan riparian yang menjadi habitat bekantan di Desa Panjaratan, maka terlebih dahulu dilakukan analisis dengan cara pendekatan sosial serta mempertimbangkan aspek pendukung dan penghambatnya. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman atau yang sering disebut dengan analisis SWOT. Analisis ini bertujuan untuk menghimpun faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pengambilan sebuah strategi atau keputusan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut nantinya digunakan sebagai rekomendasi dalam meningkatkan faktor pendukung seperti kekuatan dan peluang serta dalam waktu yang bersamaan mengurangi faktor penghambat seperti kelemahan dan ancaman. Peranan lain dari analisis SWOT yaitu sebagai instrumen yang dimanfaatkan dalam menentukan strategi. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk menekan kelemahan yang ada serta mengurangi dampak dari ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil identifikasi instrumen internal dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan yang dimiliki oleh habitat bekantan di Desa Panjaratan sebagai Rencana Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial. Pada tabel berikut ini menampilkan faktor kekuatan dan faktor kelemahan dari hasil analisis faktor internal.

Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan Potensi Habitat Bekantan di Desa Panjaratan Sebagai Rencana Penetapan Kawasan Ekosistem

No.	Faktor Kekuatan/Strength	Faktor Kelemahan/Weaknesses
1.	Jumlah bekontan dan satwa lain yang ditemui	Jarak habitat bekontan dengan jalan
2.	Kerapatan tajuk vegetasi pada habitat bekontan sebagai pakan	Aktivitas masyarakat
3.	Jarak habitat bekontan dengan sungai	Luas ruang gerak

Menurut hasil identifikasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa faktor kekuatan lebih berperan untuk mendukung Rencana Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial untuk habitat bekontan di Desa Panjaratan, sedangkan kelemahan yang ada masih dapat diantisipasi dengan berbagai cara guna meminimalisir kelemahan yang ada. Menurut Kepala Desa Panjaratan, Bapak Sahibul Yani menyampaikan bahwa jumlah bekontan yang ditemui pada saat penelitian tahun 2020 ini tentunya nanti akan terus bertambah apabila pengelolaan kawasan habitat bekontan yang ada di Desa Panjaratan terus diperbaharui, apalagi jika berbagai pihak ikut serta dalam pengelolannya. Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan masyarakat pada saat ini tidak mempengaruhi kondisi habitat bekontan karena jarak yang cukup jauh dan dianggap tidak mengganggu keberadaan habitat bekontan di Desa Panjaratan. Ditambah lagi dengan data bahwa jarak antara pemukiman masyarakat dengan habitat bekontan cukup jauh yaitu sekitar 1,8 km. Meskipun sungai di Desa Panjaratan menjadi salah satu jalur transportasi, hal tersebut tidak mempengaruhi habitat bekontan, dibuktikan dengan pada saat penelitian ada warga yang menggunakan kelotok untuk menuju Desa Pagatan Besar

dan melewati kumpulan bekontan, namun mereka tidak serta merta beranjak dari tempat beraktivitas mereka.

Sedangkan untuk ketersediaan pakan itu sendiri berhubungan dengan jenis pakan yang dikonsumsi oleh habitat bekontan. Diketahui bahwa habitat bekontan akan berpindah apabila ketersediaan pakan sudah mulai habis dan akan mencari lokasi baru untuk mencari pakan. Hal ini harus diantisipasi dengan melakukan penanaman atau penyulaman tanaman di sekitar aliran sungai yang biasa dijadikan habitat bekontan. Antisipasi ini dilakukan untuk menghindari konflik antara bekontan dan masyarakat akibat bekontan kekurangan pakan sehingga masuk ke wilayah pemukiman masyarakat.

Faktor eksternal dari hasil analisis pada penelitian ini memperoleh beberapa faktor peluang dan faktor ancaman yang mungkin dihadapi dalam Rencana Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial terhadap habitat bekontan di Desa Panjaratan. Pada tabel berikut ini menampilkan faktor peluang dan faktor ancaman dari hasil analisis faktor eksternal.

Tabel 2. Peluang dan Ancaman Potensi Habitat Bekantan di Desa Panjaratan Sebagai Rencana Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial

No.	Faktor Peluang/Opportunities	Faktor Ancaman/Threats
1.	Adanya dukungan dari aparat desa, dinas pariwisata, BKSDA	Regulasi tentang kawasan ekosistem esensial belum disahkan
2.	Dapat dijadikan destinasi wisata susur sungai bekontan	Kebakaran lahan
3.	Kondisi alam yang memenuhi ditetapkannya kawasan ekosistem esensial lahan basah	Alih fungsi lahan pertanian/persawahan

Data-data hasil analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang telah diketahui kemudian dikelompokkan dalam matriks SWOT untuk tahapan selanjutnya.

Berikut adalah tabel analisis SWOT yang telah dihimpun berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian.

Tabel 3. Matriks SWOT Rencana Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial

<i>Strengths</i> (Kekuatan)		<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)	
Jumlah bekantan yang ditemui	S1	Aktivitas masyarakat	W1
Jarak habitat bekantan dengan sungai	S2	Jarak habitat bekantan dengan jalan	W2
Kerapatan tajuk vegetasi pada habitat bekantan	S3	Luas ruang gerak	W3
<i>Opportunities</i> (Peluang)		<i>Threats</i> (Ancaman)	
Kondisi alam yang memenuhi ditetapkan kawasan ekosistem esensial lahan basah	O1	Regulasi tentang kawasan ekosistem esensial belum disahkan	T1
Adanya dukungan dari aparat desa, dinas pariwisata, BKSDA	O2	Kebakaran lahan	T2
Dapat dijadikan destinasi wisata susur sungai bekantan	O3	Alih fungsi lahan pertanian/persawahan	T3

Pada 2005, World Bank, menulis bahwa ada satwa liar yang menjadi spesies kunci di Indonesia namun tidak berada dalam kawasan hutan konservasi sekitar 80% di dataran rendah, sebagai satu diantara tanda keragaman hayati penting tidak dilindungi. Kehidupan mereka terancam karena wilayah banyak terbebani izin. Kondisi inilah yang menjadi dasar bagi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mendorong agar lokasi-lokasi tersebut dapat dijadikan KEE atau kawasan ekosistem esensial. Berdasarkan hasil pemetaan dari bidang pengukuran di KLHK menyatakan bahwa hingga 2019 target dalam penetapan KEE terdapat 105 juta hektar, namun yang terealisasi baru ada 23 juta hektar KEE, seperti ekosistem mangrove dan taman keragaman hayati. KEE merupakan inovasi dan upaya kolaboratif pengelolaan keragaman hayati dan ekosistem antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada dasarnya, KEE ini konsep pembangunan mengutamakan masyarakat namun bersinergi dengan konservasi keragaman hayati.

Secara umum ekosistem esensial diartikan sebagai ekosistem yang tidak berada di dalam kawasan konservasi, namun memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara ekonomi, ekologis serta sosial. Sedangkan pengertian Kawasan Ekosistem Esensial atau yang disingkat dengan KEE merupakan kawasan yang dilindungi sebagai ekosistem esensial serta dilakukan pengelolaan kawasan hutan konservasi sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi yang dianut dalam kehutanan. Kawasan Ekosistem Esensial dibagi menjadi 4 jenis yaitu sebagai taman keanekaragaman

hayati, areal bernilai konservasi tinggi, ekosistem lahan basah serta koridor kehidupan liar. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi menjadi tahapan awal dalam perencanaan kawasan ekosistem esensial, kemudian dilanjutkan dengan membentuk forum kolaborasi. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan penilaian serta penyusunan peta indikatif dengan proses deliniasi, kemudian mengusulkan lokasi sebagai kawasan ekosistem esensial serta penetapan kawasan ekosistem esensial pada lokasi tersebut sebagai tahap akhirnya.

Satu diantara perhatian yang diberikan dalam isu pembangunan yang berkeadilan yaitu upaya dalam pengelolaan ekosistem esensial. "Program Pembangunan yang Berkeadilan" yang dicanangkan berdasarkan Instruksi Presiden RI No 3 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa melalui program konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan perlindungan mampu menjadi sistem penyangga kehidupan agar dapat meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan ekosistem esensial. Ekosistem Esensial sendiri merupakan peruntukan kawasan sebagai ekosistem atau wilayah baik secara alami atau buatan dimana memiliki fungsi sebagai penyangga sistem kehidupan yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis. Ekosistem Esensial ini terdiri atas Ekosistem Esensial Terrestrial dan Ekosistem Esensial Lahan Basah.

Ekosistem Esensial Terrestrial merupakan ekosistem suatu daratan baik yang berbentuk hutan maupun bukan hutan dengan adanya keunikan terhadap jenis

serta memiliki peran sebagai koridor terhadap satwa liar dan habitat penting berbagai jenis tumbuhan, sedangkan Ekosistem Lahan Basah merupakan ekosistem pada sebgai perairan dengan adanya keunikan terhadap fungsi penting dari habitat dan/atau jenis, serta menjadi habitat dari populasi spesies burung air dan habitat perairan yang tinggi. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan upaya perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap hubungan timbal balik antar manusia dan sumberdaya alam yang berada di dalam kawasan ekosistem esensial beserta segala aktivitasnya di dalamnya, yang bertujuan untuk membina keserasian dan kelestarian ekosistem serta meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Kawasan yang berada di luar kawasan konservasi yang menjadi Kawasan ekosistem esensial diatur secara langsung pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 24 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah selaku pemilik hak atas pengelolaan sumberdaya alam daerah juga memiliki hak untuk mengelola kawasan yang memiliki nilai ekosistem penting. Dalam hal ini kawasan ekosistem esensial akan dikelola secara Bersama-sama tanpa merubah status lahan atau hak yang sudah ada. Selain itu dalam proses penetapannya, Kementerian memiliki wewenang penuh dalam penetapan kawasan ekosistem esensial yang berorientasi pada konservasi. Diinformasikan bahwa dalam rancangan aturan KEE yang sedang disusun perlu memperhatikan: karakteristik KEE, integrasi program berbasis lansekap di wilayah KEE berada, kelembagaan dan organisasi, lingkup dan sebaran tugas serta arena aksi. Dalam rencana aksi ini harus diatur sesuai tipologi masing-masing KEE.

Semangat perlindungan kawasan ekosistem esensial bagi upaya konservasi perlu dipertegas dalam hal pengawetan jenis, demikian kata pakar. Terbukti bahwa hampir 60% daerah jelajah satwa berada di luar kawasan konservasi dan penanganan konflik satwa dengan manusia dipecahkan melalui pengelolaan dan perlindungan KEE. Untuk itu, ketika daerah mengusulkan adanya penetapan KEE oleh Menteri, maka perlu diatur standar pedoman pengelolaan untuk

setiap ekosistem. Standar pedoman pengelolaan ini diatur dalam Perdirjen ketika Permen LHK tentang Perlindungan KEE ini telah terbit. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat segera menerbitkan peraturan tentang perlindungan KEE.

Sebelum dilakukan kegiatan identifikasi oleh tim BKSDA Kalsel untuk kemudian diusulkan menjadi areal KEE, beberapa kegiatan yang pernah dilakukan di areal ini. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di lokasi ini secara tidak langsung menginformasikan bahwa kawasan ini penting dan perlu untuk terus dilindungi. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di areal ini antara lain sebagai berikut.

1. Pernah dijadikan lokasi kunjungan oleh rombongan peserta seminar internasional lahan basah pada tahun 2018 yang berasal dari beberapa negara seperti Australia, Belanda dan Indonesia.
2. Sosialisasi pentingnya menjaga bekantan beserta habitatnya oleh BKSDA Kalsel pada tahun 2018 guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melindungi satwa terancam punah di Desa Panjaratan.
3. Terdapat LSM peduli bekantan bernama Gahipbta yang merupakan kumpulan anak muda Desa Panjaratan yang dibentuk sejak tahun 2017 untuk menjaga dan melindungi bekantan dan habitatnya yang semakin hari semakin terusik oleh keberadaan perkebunan sawit.
4. Perkebunan kelapa sawit PT. Kintap Jaya Watindo menjadikan areal yang saat ini dihuni bekantan ditetapkan menjadi areal lindung sehingga tidak akan dibuka untuk ditanami sawit.
5. Memfungsikan areal tersebut menjadi kawasan ekowisata susur sungai dan jumpa bekantan yang dipromosikan melalui media sosial dengan tujuan mendorong pergerakan ekonomi Desa Panjaratan.

Dengan terbitnya peraturan, KEE berfungsi mengatasi tantangan konservasi sumberdaya alam di luar KSA dan KPA sebagai penyangga kehidupan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

1. Mengidentifikasi, Menginventarisasi dan Memvalidasi Data Ekosistem
2. Mensosialisasi dan Mengkoordinasi Pengelolaan Ekosistem Esensial (EE)
3. Menyusun kesepakatan Pengelolaan EE

4. Membentuk Forum Kerjasama / Kolaborasi Pengelolaan

Metode atau cara yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial yaitu *shared-learning* melalui presentasi dan diskusi, kunjungan ke lapangan (*Field Visit*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Semua hal ini telah dilakukan oleh tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari latar belakang, potensi, isu-isu dan upaya atau aktivitas yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan hutan mangrove sebagai habitat bekantan demi kelestarian kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan (*field visit*), *fact finding* dan diskusi kelompok serta pleno dari peserta penyusunan Rencana Aksi Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial di Desa Panjaratan, terdapat 6 (enam) isu pokok dalam pengelolaan hutan mangrove yang dijadikan Kawasan Ekosistem Esensial, yaitu:

1. Aspek Lingkungan
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
3. Peraturan dan Penegakan Hukum
4. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Infrastruktur
6. Pengembangan Kelembagaan Pengelola Kawasan.

Setelah ditunjuk sebagai kawasan ekosistem esensial, kawasan tersebut dapat dikembangkan secara terpadu dengan memegang pengembangan ekosistem esensial, seperti konservasi, edukasi, ekonomi, peran serta masyarakat, dan rekreasi. Hingga saat ini semua instansi pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut ikut serta dalam forum perencanaan penetapan kawasan ekosistem esensial di Desa Panjaratan karena pada dasarnya manfaat yang akan didapat nantinya sangat menguntungkan bagi pemerintahan Kabupaten. Melihat potensi yang dimiliki oleh kawasan ini, baik sebagai areal perlindungan bagi bekantan maupun potensi ekowisata yang sedemikian menjanjikan, maka hal itu dapat menjadi pertimbangan utama untuk mengusulkan areal yang berada di Desa Panjaratan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial. Penetapan areal ini menjadi KEE setidaknya akan memberikan jaminan bagi kelangsungan keberadaan kawasan dan

satwa liar yang berhabitat di dalamnya, sehingga potensi hilang dan punahnya keanekaragaman hayati di areal tersebut dapat dihindarkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa sebagai rekomendasi rencana penetapan Kawasan Ekosistem Esensial di Desa Panjaratan, berdasarkan hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor pendukung lebih dominan dibanding faktor penghambatnya. Adanya dukungan dari pemerintah baik pada tingkat kabupaten hingga provinsi dalam rencana penetapan kawasan ekosistem esensial di Desa Panjaratan.

Saran

Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain: perlu adanya status kawasan ekosistem esensial bekantan di Desa Panjaratan yang tertuang dalam bentuk Perda, sembari menunggu peraturan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan Kawasan Ekosistem Esensial di Desa Panjaratan, pemberdayaan berbasis masyarakat yang didukung pemerintah harus terus berjalan. Perlu dukungan berbagai pihak seperti BKSDA, Pemda, Perguruan Tinggi, swasta dan LSM dalam upaya perluasan kawasan ekosistem esensial bekantan di Desa Panjaratan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, T., Amir Ma'ruf, Ismed Syahbani dan Mardi T. Rengku. 2007. Kondisi Habitat dan Penyebaran Bekantan (*Nasalis larvatus* Wurmb) di Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Prosiding Seminar Pemanfaatan HHBK dan Konservasi Biodiversitas menuju Hutan Lestari.
- Bismark M. 2009. *Biologi Konservasi Bekantan (Nasalis larvatus)*. Siran SA, Mukhtar AS, Setyawati T, editor. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan

- Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.
- Collinge JP. 2001. Diseases of humans and animals: their causes and molecular basis. *Annual Review Neurosci* 24: 519–50.
- Haris, R. 2014. Keanekaragaman Vegetasi dan Satwa Liar Hutan Mangrove. Makassar: Universitas Indonesia Timur. *Jurnal Bionature* Vol: 15 No. 2. Hal: 117-122.
- Krebs CJ. 1989. *Ecological Methodology*. Harper Collins *Publisher*, (US): Inc. New York.
- MacKinnon K. 1987. Conservation status of primates in Malaysia, with special reference to Indonesia. *Primate Conservation*. 8:175-183.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Edisi Revisi)*. Cetakan kedua puluh satu. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sianipar dan Entang. 2003. *Teknis-teknis Analisis Manajemen. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.
- Soegianto A. 1994. *Ekologi Kuantitatif. Usaha Nasional*. (ID): Surabaya-Indonesia.

REKOMENDASI PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI DESA PANJARATAN

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ ksdae.menlhk.go.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%